

# Membangun Martabat Polri

Oleh Dini Dewi Heniarti

Polisi diharapkan dapat menempatkan dirinya, kapan ia harus bertindak sebagai "a strong hand of society" dan kapan bertindak sebagai "a soft hand of society" (Satjipto Rahardjo).

Hari Bhayangkara yang diperingati setiap 1 Juli hendaknya ditandai dengan terus-menerus melakukan perubahan untuk menjadi polisi Indonesia yang lebih baik. Bahkan kepolisian di negara lain mulai meninggalkan gaya militer dan menggantinya dengan gaya sipil yang layak digunakan polisi untuk menertibkan sekaligus melindungi dan melayani masyarakat.

Sejak pemisahan kepolisian dari jajaran angkatan bersenjata, banyak pertanyaan menyangkut kesiapan lembaga tersebut mengubah diri. Pertanyaan ini muncul menyangkut agenda perubahan yang harus dilakukan Polri agar mampu bekerja sesuai dengan tantangan barunya.

Beban di pundak Polri ternyata tidak ringan. Di satu sisi, belum semua anggota Polri siap menjalankan peran dan visinya yang baru berkaitan dengan sikap mental dan budaya institusi yang memerlukan proses dan waktu untuk berubah. Di sisi lain, masyarakat tidak sabar melihat kinerja Polri yang masih belum banyak berubah dari pola dan cara lama

Polri sebagai garda terdepan penegakan supremasi hukum memerlukan tindakan yang penuh kearifan ditopang partisipasi masyarakat yang patuh terhadap hukum. Dalam kondisi politik, ekonomi, dan sosial yang stabil pun, pengoperasionalan tugas-tugas kepolisian menghadapi dilema. Polisi yang berniat melakukan pengayoman dalam aksi unjuk rasa seringkali terperangkap dalam tindakan penindasan.

Dilema ini menuntut polisi untuk benar-benar memiliki nilai-nilai integritas (integrity), kewajaran (fairness), dan respek (respect), pada konstitusi dan otoritas pemerintahan, jujur (honesty), berani (courage), dan welas asih (compassion), agar polisi dapat bersikap arif dan bijaksana dalam merespons setiap situasi dan kondisi yang berbeda.

Sejarah mencatat, kekerasan yang dilakukan aparat kepolisian berkaitan dengan struktur sebagai bagian dari watak dan karakter dari rezim yang berkuasa yang fungsi tugasnya lebih ditujukan kepada upaya menjaga, melanggengkan, dan membenarkan tindakan penguasa, bukan sebagai pelayan negara yang melindungi masyarakat. Saat bersamaan, euforia reformasi dan kebebasan cenderung membuat masyarakat berlebihan dalam menempatkan HAM. Kencangnya sorotan terhadap pelanggaran HAM yang dilakukan aparat kepolisian dan tuntutan perlindungan HAM, menempatkan polisi pada posisi serba sulit.

Akan tetapi, Polri terus berbenah diri untuk tumbuh menjadi institusi yang profesional dan mandiri. Reformasi menuju Polri yang profesional ditekankan agar Polri dapat menjadi bagian dari masyarakat madani yang bercirikan hukum dan menjunjung tinggi HAM. Sejalan dengan semangat social centered yang mendasari reformasi politik selama menggantikan konsep state

centered, reformasi Polri pun diarahkan pada pengembangan perpolisian masyarakat (community policing) yang intinya menekankan pada kemitraan antara Polri dan masyarakat.

Dalam meningkatkan profesionalisme ini seyogianya polisi diberikan pengetahuan dan pendidikan yang cukup tentang pandangan terhadap manusia yang utuh, lengkap dengan hak-hak asasinya, agar timbul respek terhadap manusia yang harus dilayaninya. Jadi, bukan manusia yang terbatas dan tidak utuh (one dimensional man), seperti kata Helbert Marcuse, yang karena kemajuan industri modern dengan teknologinya lebih menekankan dimensi-dimensi lain dari manusia dan menjadikan manusia pasif serta tidak kreatif.

Polisi seharusnya memahami hak manusia dalam arti terminologi hubungan atau yang tepat antarindividu dengan komunalnya, atau antara sekelompok orang dan masyarakatnya. Polisi hendaknya juga memahami HAM sebagai suatu kesatuan yang tidak bisa dipisah-pisahkan. Polisi profesional memang berseragam, namun jiwanya harus tetap sipil (a civilian in uniform). Polisi yang profesional harus akuntabel karena karakter pekerjaan polisi lekat dengan penggunaan wewenang paksa (coersive power) dan pengambilan keputusan secara individu (diskresi).

Polri perlu cepat berbenah menghadapi masa depan yang makin terbuka, demokratis, egalitarian. Untuk itu, dalam merancang pendidikan, latihan, dan anggaran, komando dan lain-lain untuk menyongsong tugas-tugas spesifik tersebut, otonomi penuh mutlak diperlukan Polri. Selanjutnya, perlu dilakukan reformasi kelembagaan dan culture (doktrin, pendidikan) ke arah kepolisian yang lebih sipil yang berfungsi sebagai abdi masyarakat dengan lebih mengedepankan tindakan preventif, mengayomi. Profesionalisme polisi harus secara komprehensif, memiliki sistem teori, penguasaan teknik dan keterampilan yang berbasis teknologi, memiliki kode etik dalam menerapkan pengetahuan dan keterampilan, dan memiliki konsep layanan yang ideal. Kombinasi faktor eksternal dan internal (renstra) mendorong terciptanya polisi profesional dan mandiri. Polri harus dapat membangun kepercayaan masyarakat karena penciptaan rasa aman yang menjadi tugas Polri sangat ditentukan oleh kepercayaan masyarakat.

Selamat ulang tahun, Polri!\*\*\*

Penulis, kandidat Doktor Ilmu Hukum Unpad, dosen HAM dan Peradilan Militer Unisba.

*Sumber:*

<http://newspaper.pikiran-rakyat.com/prprint.php?mib=beritadetail&id=84136>